Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22875-22882
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Fatimiyah: Analisis Kebijakan Ekonomi dan Relevansinya terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer

Khaliza Lutfia, Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa, Musfirah HR
Program Studi Makgister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
khalizalutfia82@gmail.com, mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id, mars.infinity09@gmail.com, *

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Fatimiyah serta mengevaluasi relevansi kebijakan ekonominya terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan kepustakaan melalui penelaahan artikel ilmiah, buku akademik, dan literatur historis yang membahas kebijakan fiskal, perdagangan, sektor riil, dan pembangunan sumber daya manusia pada periode Fatimiyah. Data dianalisis menggunakan analisis isi melalui tahapan seleksi sumber, pengelompokan tematik, sintesis, dan interpretasi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Daulah Fatimiyah ditopang oleh pengelolaan Baitul Mal, optimalisasi zakat, kharaj, jizyah, dan bea perdagangan, pengawasan pasar, pembangunan pelabuhan dan irigasi, penguatan pertanian, serta investasi pendidikan melalui Al-Azhar. Kebijakan tersebut membentuk sistem ekonomi yang menghubungkan penerimaan negara dengan redistribusi kekayaan, penyediaan layanan publik, stabilitas perdagangan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, akuntabilitas, dan keberlanjutan yang tercermin dalam kebijakan tersebut tetap relevan bagi ekonomi Islam modern. Relevansi tersebut terutama terlihat pada integrasi keuangan publik dengan zakat dan wakaf produktif, penguatan sektor riil dan UMKM, pembangunan infrastruktur, transparansi kelembagaan, serta investasi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman ekonomi Daulah Fatimiyah dapat menjadi sumber pembelajaran historis untuk merancang kebijakan ekonomi Islam yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada maqashid al-syariah, tanpa menyalin bentuk kelembagaannya secara langsung ke dalam konteks negara modern.

Kata kunci: *Daulah Fatimiyah, Pemikiran Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal, Perdagangan Internasional, Baitul Mal*

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer tidak dapat dilepaskan dari kajian historis terhadap praktik ekonomi masyarakat Muslim pada masa klasik, terutama bagaimana institusi negara, kebijakan fiskal, perdagangan, dan distribusi kekayaan dikembangkan dalam kerangka nilai Islam. Salah satu periode penting yang menunjukkan hubungan antara kekuasaan politik dan pengelolaan ekonomi berbasis prinsip Islam adalah masa Daulah Fatimiyah (909–1171 M), ketika Mesir berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan kawasan Asia, Afrika, dan Eropa. Kajian terbaru menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Fatimiyah tidak hanya ditopang oleh aktivitas perdagangan, tetapi juga oleh pengelolaan pendapatan negara, sistem perpajakan, pengembangan sektor pertanian, serta dukungan terhadap aktivitas produksi dan perdagangan.[1]

Dalam konteks perkembangan ekonomi global saat ini, isu mengenai keadilan distribusi, keberlanjutan ekonomi, penguatan sektor riil, dan tata kelola keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan utama bagi sistem ekonomi modern. Ekonomi Islam kontemporer berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pengembangan instrumen seperti keuangan sosial Islam, wakaf produktif, dan sistem keuangan berbasis nilai etika. Namun, sebagian besar diskursus ekonomi Islam modern masih lebih banyak berfokus pada inovasi kelembagaan kontemporer seperti perbankan syariah dan sukuk, sementara kajian mengenai akar historis kebijakan ekonomi pemerintahan Islam masih relatif terbatas. Penelitian mengenai hubungan antara pengalaman ekonomi Islam masa lalu dengan desain kebijakan ekonomi modern menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip keadilan, distribusi, dan kemaslahatan dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda.[2]

Daulah Fatimiyah menjadi objek kajian yang menarik karena memiliki karakteristik ekonomi yang kompleks, yaitu kombinasi antara sistem perdagangan terbuka, pengelolaan fiskal negara, penguatan infrastruktur ekonomi,

serta hubungan ekonomi lintas wilayah. Strategi ekonomi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu sistem ekonomi tidak hanya bergantung pada instrumen moneter atau perdagangan, tetapi juga pada kemampuan negara dalam membangun tata kelola ekonomi yang mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Studi mengenai strategi ekonomi Fatimiyah menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan, pengelolaan pajak, dan pembangunan sektor produktif menjadi faktor utama yang mendukung kemajuan ekonomi dinasti tersebut.[3]

Meskipun demikian, kajian ekonomi Islam historis mengenai Daulah Fatimiyah masih menghadapi beberapa kesenjangan penelitian. Sebagian penelitian terdahulu cenderung membahas aspek sejarah politik, perkembangan peradaban, atau deskripsi umum mengenai kemajuan ekonomi Fatimiyah, tetapi belum banyak menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan ekonomi Fatimiyah merepresentasikan pemikiran ekonomi Islam dan bagaimana prinsip tersebut dapat dikontekstualisasikan terhadap kebutuhan ekonomi Islam kontemporer.[4] Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis terhadap kebijakan ekonomi Daulah Fatimiyah dengan perspektif pemikiran ekonomi Islam serta relevansinya bagi pengembangan ekonomi Islam modern.

Penelitian mengenai ekonomi Daulah Fatimiyah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan perhatian akademik terhadap aspek kebijakan ekonomi dan kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam. Ningsih dan Siradjuddin menganalisis kebijakan fiskal dan perdagangan Daulah Fatimiyah dengan menekankan aspek keadilan, redistribusi kekayaan, serta orientasi kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari prinsip ekonomi Islam. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada identifikasi kebijakan ekonomi tanpa mengembangkan analisis lebih luas mengenai transformasi nilai-nilai ekonomi Fatimiyah dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.[4] Penelitian Fardani, Nuratika, dan Sirajuddin menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi Fatimiyah didukung oleh strategi pengelolaan sumber pendapatan negara, aktivitas perdagangan, industri, serta sektor ekonomi produktif lainnya. Studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami mekanisme ekonomi Fatimiyah, tetapi belum secara spesifik membahas hubungan konseptual antara strategi ekonomi historis tersebut dengan tantangan ekonomi Islam masa kini seperti pembangunan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi.[5]

Sementara itu, penelitian Annisa, Sapa, dan Lutfi menyoroti dinamika ekonomi Dinasti Fatimiyah dengan menekankan peran kebijakan pemerintahan dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi Fatimiyah memiliki karakter adaptif terhadap kondisi sosial-politik pada masanya. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara eksplisit mengkaji aspek pemikiran ekonomi Islam yang melandasi kebijakan tersebut serta relevansinya terhadap pengembangan model ekonomi Islam kontemporer.[6] Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat ditemukan bahwa kajian tentang ekonomi Fatimiyah telah berkembang pada aspek historis dan deskriptif, tetapi masih terdapat ruang penelitian mengenai analisis konseptual terhadap kebijakan ekonomi Fatimiyah sebagai bagian dari evolusi pemikiran ekonomi Islam. Celah penelitian ini menjadi dasar penting untuk melakukan kajian yang menghubungkan pengalaman ekonomi historis dengan kebutuhan pengembangan ekonomi Islam modern.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat kebutuhan akademik untuk memperluas perspektif mengenai ekonomi Islam yang tidak hanya dipahami melalui institusi modern, tetapi juga melalui pengalaman historis pemerintahan Islam dalam mengelola aktivitas ekonomi. Kajian terhadap Daulah Fatimiyah memberikan peluang untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan ekonomi, pengelolaan sumber daya publik, perdagangan yang beretika, dan distribusi kesejahteraan diterapkan dalam sebuah sistem pemerintahan Islam.[7] Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengintegrasikan kajian sejarah ekonomi Islam dengan perspektif pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya mendeskripsikan kebijakan ekonomi Fatimiyah, penelitian ini berusaha menganalisis nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam kebijakan tersebut dan mengevaluasi relevansinya terhadap isu ekonomi modern, khususnya mengenai tata kelola ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah ekonomi Islam, tetapi juga memperkuat diskursus mengenai bagaimana pengalaman ekonomi masa lalu dapat menjadi sumber refleksi teoritis bagi pengembangan ekonomi Islam masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Fatimiyah, mengidentifikasi karakteristik kebijakan ekonominya, serta mengevaluasi relevansi prinsip-prinsip ekonomi tersebut bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Melalui pendekatan historis-analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara pengalaman ekonomi Islam klasik dan inovasi ekonomi Islam modern.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12171
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tinjauan kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Fatimiyah melalui penelaahan kritis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep, kebijakan ekonomi, serta relevansinya terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel ilmiah yang membahas pemikiran ekonomi Islam, sejarah ekonomi Daulah Fatimiyah, kebijakan fiskal, perdagangan, serta tata kelola ekonomi Islam yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi pada rentang 2020–2025. Data sekunder meliputi buku akademik, prosiding ilmiah, serta dokumen historis yang relevan untuk memperkuat interpretasi dan memberikan konteks terhadap hasil analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, Crossref, DOAJ, dan portal penerbit jurnal menggunakan kata kunci *Fatimid Dynasty*, *Islamic Economic Thought*, *Fatimid Economic Policy*, *Islamic Fiscal Policy*, dan *Islamic Economic History*. Artikel dipilih berdasarkan beberapa kriteria inklusi, yaitu: (1) merupakan artikel ilmiah yang melalui proses *peer review*; (2) memiliki metadata lengkap berupa nama penulis, tahun, judul, nama jurnal, volume, nomor, halaman, dan DOI atau tautan penerbit; (3) diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2025; serta (4) memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dari proses penyaringan tersebut diperoleh ±30 artikel, kemudian 18 artikel yang memenuhi seluruh kriteria digunakan sebagai sumber utama analisis, sedangkan sumber pendukung digunakan untuk memperkuat konteks historis dan konseptual.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan: (1) identifikasi dan seleksi literatur sesuai kriteria inklusi; (2) reduksi data melalui pengelompokan informasi berdasarkan tema kebijakan fiskal, perdagangan, distribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya, dan pemikiran ekonomi Islam; (3) sintesis tematik untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu; serta (4) interpretasi kritis guna mengidentifikasi karakteristik kebijakan ekonomi Daulah Fatimiyah, kesenjangan penelitian, dan relevansinya terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Untuk meningkatkan validitas hasil, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai artikel ilmiah dan literatur akademik sehingga diperoleh interpretasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Diskusi

Daulah Fatimiyah merupakan salah satu kekhalifan Islam yang meimiliki pengaruh besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan intelektual dunia islam pada abad ke-10 hingga abad ke-12 Masehi. Dinasti ini berdiri pada tahun 909M di wilayah Ifriqiyah (Tunisia sekarang) dibawah kepemimpinana Ubaidillah al-Mahdi Billah. Berbeda dengan Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Daulah Fatimiyah mengembangkan sistem pemerintahan berdasarkan doktrin Syiah Ismailiyah dengan mengklaim garis keturunan langsung dari Fatimah Az-zahra dan Ali bin Abi Thalib. Klaim tersebut menjadi dasar legitimasi politik seklaigus memperkuat identitas keagamaan pemerintahan Fatimiyah.

3.1. Kebijakan Fiskal sebagai Fondasi Stabilitas Ekonomi Daulah Fatimiyah

Kebijakan fiskal Daulah Fatimiyah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, usyur, ghanimah, dan perdagangan internasional dikelola melalui Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang bertugas menghimpun, mengalokasikan, dan mendistribusikan dana untuk kepentingan publik. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas umum, serta bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan ini menunjukkan bahwa sistem fiskal Fatimiyah tidak hanya berorientasi pada pembiayaan negara, tetapi juga menerapkan prinsip redistribusi kekayaan dan kemaslahatan masyarakat yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sedangkan kharaj dan jizyah menjadi sumber penerimaan negara yang mendukung keberlanjutan fiskal dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Praktik tersebut sejalan dengan pemikiran Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* yang menekankan pentingnya pajak yang adil dan proporsional, serta pandangan Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang menempatkan negara sebagai pengelola kemaslahatan umat melalui penyediaan keamanan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan fiskal Daulah Fatimiyah dapat dipandang sebagai implementasi awal *Islamic Public Finance* yang mengintegrasikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan negara.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12171
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa sistem fiskal Daulah Fatimiyah dibangun melalui pengelolaan pendapatan negara yang berasal dari kharaj, jizyah, ushr, bea perdagangan, dan pengelolaan aset negara yang kemudian dialokasikan untuk membiayai administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pertahanan, serta pelayanan publik. Pengelolaan fiskal tersebut menunjukkan adanya orientasi terhadap stabilitas ekonomi sekaligus pemenuhan kesejahteraan masyarakat sehingga Baitul Mal berfungsi tidak hanya sebagai lembaga penghimpun pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi Fatimiyah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan fiskal dalam mengelola sumber daya publik secara efektif.[8], [9]

Temuan tersebut sejalan dengan kajian Yaacov Lev yang menjelaskan bahwa administrasi negara Fatimiyah memiliki sistem birokrasi fiskal yang relatif maju dibandingkan kerajaan lain pada periode yang sama. Organisasi administrasi tersebut memungkinkan pemerintah menjaga kesinambungan penerimaan negara sekaligus mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi dalam jangka panjang.[10]

Jika dibaca melalui perspektif keuangan publik kontemporer, pengelolaan Baitul Mal pada masa Fatimiyah menunjukkan pentingnya keterhubungan antara penghimpunan penerimaan, penetapan prioritas belanja, dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Pendapatan negara tidak berhenti sebagai instrumen pemeliharaan birokrasi, tetapi diarahkan pula pada infrastruktur, keamanan perdagangan, pendidikan, dan bantuan sosial. Pola tersebut sejalan dengan prinsip keuangan publik Islam yang menempatkan zakat, pajak, aset negara, dan sumber penerimaan lainnya sebagai amanah yang harus dialokasikan untuk kemaslahatan umum [12]. Kajian terbaru juga menegaskan bahwa zakat produktif dan penerimaan fiskal dapat diposisikan secara komplementer untuk memperkuat ketahanan ekonomi negara sepanjang dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan tidak mengurangi hak kelompok penerima yang telah ditentukan [13]. Dengan demikian, relevansi pengalaman Fatimiyah tidak terletak pada peniruan jenis pungutannya secara literal, melainkan pada konsistensi hubungan antara legitimasi penerimaan negara dan manfaat sosial yang dihasilkan.

Dimensi redistribusi pada kebijakan fiskal Fatimiyah juga memberikan landasan untuk memahami bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup dibangun melalui pertumbuhan penerimaan negara. Stabilitas memerlukan mekanisme yang mengalirkan kembali sumber daya kepada kelompok rentan dan sektor produktif. Pendayagunaan zakat dan wakaf yang berorientasi pada maqashid al-syariah dapat melindungi kebutuhan dasar, memperkuat kapasitas ekonomi penerima, dan mengurangi kesenjangan [14]. Bukti empiris kontemporer menunjukkan bahwa program zakat dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, meskipun dampaknya dipengaruhi desain program, karakteristik penerima, dan kualitas kelembagaan [21]. Hal ini memperkuat penafsiran bahwa orientasi kesejahteraan dalam fiskal Fatimiyah merupakan prinsip yang tetap relevan, sedangkan bentuk kebijakan modern perlu disesuaikan dengan sistem hukum, administrasi, dan data sosial ekonomi yang berlaku saat ini.

Relevansi lain terletak pada kebutuhan membangun kapasitas kelembagaan. Pengalaman historis menunjukkan bahwa keberhasilan instrumen fiskal bergantung pada aparatur, pencatatan, pengawasan, serta konsistensi administrasi. Penelitian mengenai integrasi keuangan sosial Islam saat ini menempatkan kualitas sumber daya manusia, regulasi, teknologi, dan basis data terpadu sebagai faktor prioritas [15]. Pengembangan indeks keberlanjutan program keuangan sosial Islam juga menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya dinilai dari jumlah dana yang dihimpun, tetapi dari keberlanjutan manfaat, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kemampuan program meningkatkan ketahanan ekonomi penerima [16]. Oleh sebab itu, prinsip administrasi Fatimiyah dapat diterjemahkan ke dalam kebutuhan audit, pelaporan kinerja, integrasi data, dan evaluasi manfaat agar pengelolaan dana sosial dan fiskal tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi menghasilkan dampak yang dapat diukur.

3.2. Perdagangan Internasional sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan ekonomi Daulah Fatimiyah didukung oleh berkembangnya perdagangan internasional yang memanfaatkan posisi strategis Mesir sebagai penghubung Asia, Afrika, dan Eropa. Pemerintah memperkuat infrastruktur pelabuhan, terutama Alexandria, menjaga keamanan jalur perdagangan, serta menetapkan regulasi yang mendukung aktivitas niaga sehingga berbagai komoditas seperti rempah-rempah, sutra, kapas, gula, logam mulia, dan hasil pertanian dapat diperdagangkan secara luas. Selain meningkatkan pendapatan negara, perdagangan juga diawasi melalui sistem *hisbah* oleh *muhtasib* untuk menjamin kejujuran transaksi, kualitas barang, dan mencegah praktik monopoli maupun penimbunan. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam, sehingga keberhasilan perdagangan Daulah Fatimiyah tidak hanya ditopang oleh letak geografisnya, tetapi juga oleh tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Daulah Fatimiyah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya mengoptimalkan posisi geografis Mesir sebagai simpul perdagangan yang menghubungkan Laut

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12171
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tengah, Laut Merah, Afrika Timur, Jazirah Arab, hingga Asia Selatan. Pemerintah memberikan perhatian terhadap keamanan jalur perdagangan, pengembangan pelabuhan, serta pengaturan aktivitas pasar sehingga mampu meningkatkan volume perdagangan internasional dan memperkuat posisi Mesir sebagai pusat distribusi komoditas regional.[11]

Kajian sejarah ekonomi Islam juga menunjukkan bahwa perdagangan Fatimiyah berkembang melalui integrasi antara kebijakan fiskal, pengawasan pasar, dan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Kombinasi kebijakan tersebut menciptakan efisiensi distribusi barang, memperluas jaringan perdagangan lintas wilayah, serta meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas perdagangan internasional.[10], [12]

Pengawasan pasar melalui institusi hisbah memperlihatkan bahwa keterbukaan perdagangan pada masa Fatimiyah tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Negara tetap memiliki tanggung jawab menjaga kejujuran ukuran dan timbangan, mencegah penimbunan, melindungi kualitas barang, dan memastikan akses pasar yang relatif adil. Kombinasi antara fasilitasi perdagangan dan pengawasan etis tersebut relevan dengan ekonomi Islam kontemporer yang menghadapi perluasan perdagangan digital, transaksi lintas batas, serta asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Prinsip dasarnya adalah bahwa efisiensi pasar harus berjalan bersama perlindungan konsumen, persaingan yang sehat, dan kepastian transaksi. Dalam kerangka ini, pelabuhan, jalan, keamanan jalur niaga, dan informasi pasar pada masa Fatimiyah dapat disejajarkan secara fungsional dengan infrastruktur logistik, sistem pembayaran, sertifikasi, dan platform informasi pada masa sekarang.

Pengembangan perdagangan juga berkaitan dengan kepercayaan terhadap lembaga. Pada sistem modern, kepercayaan tidak hanya dibentuk oleh reputasi personal, tetapi melalui transparansi pencatatan dan kemampuan menelusuri transaksi. Kajian mengenai wakaf tunai menunjukkan bahwa teknologi blockchain berpotensi meningkatkan akuntabilitas, integrasi data, keamanan, dan keterlacakan pengelolaan dana [25]. Perspektif tersebut dapat digunakan untuk mengontekstualisasikan semangat pengawasan pasar Fatimiyah: teknologi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjaga amanah dan mengurangi ruang penyalahgunaan. Karena itu, pengembangan ekonomi Islam kontemporer perlu menggabungkan inovasi digital dengan tata kelola, standar pelaporan, dan perlindungan data agar efisiensi transaksi tetap sejalan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab.

3.3. Penguatan Sektor Riil melalui Pertanian dan Infrastruktur

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Fatimiyah melalui pembangunan irigasi, pengelolaan lahan pertanian, dan pemeliharaan infrastruktur produksi. Kebijakan tersebut meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan sehingga sektor pertanian menjadi fondasi bagi perkembangan perdagangan dan industri pada masa berikutnya.[8]

Selain sektor pertanian, pemerintah juga melakukan pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas distribusi yang memperkuat keterhubungan antarwilayah. Investasi terhadap infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Fatimiyah telah menerapkan pendekatan pembangunan sektor riil yang terintegrasi dengan aktivitas perdagangan dan administrasi negara.[10]

Kebijakan pertanian dan infrastruktur tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara fiskal dan sektor riil. Belanja negara diarahkan untuk memperbaiki kapasitas produksi, menurunkan biaya distribusi, dan menjaga ketersediaan pangan. Dalam ekonomi Islam kontemporer, orientasi ini penting karena pertumbuhan sektor keuangan yang tidak terhubung dengan produksi berisiko memperlebar jarak antara aktivitas finansial dan kebutuhan nyata masyarakat. Pengalaman Fatimiyah memberikan pelajaran bahwa penerimaan publik seharusnya menghasilkan aset dan layanan yang memperkuat produktivitas jangka panjang. Karena itu, pembiayaan syariah dan keuangan sosial Islam dapat diarahkan pada irigasi, rantai pasok pangan, fasilitas usaha, layanan kesehatan, dan pendidikan, dengan mekanisme pengawasan yang menjaga keberlanjutan manfaat.

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen kontemporer yang dapat menghubungkan tujuan sosial dengan pembangunan sektor riil. Model wakaf tunai untuk perusahaan sosial menunjukkan bahwa dana wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi kegiatan produktif yang memiliki dampak sosial [17]. Kajian berbasis maqashid juga menekankan perlunya mengarahkan wakaf tunai pada kegiatan yang melindungi harta, kehidupan, pendidikan, dan kesejahteraan penerima manfaat [18]. Dari sisi partisipasi, penerimaan wakaf tunai oleh generasi muda dipengaruhi pemahaman, kemudahan, dan kepercayaan terhadap pengelola [24]. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan sektor riil memerlukan desain kelembagaan yang menggabungkan kelayakan ekonomi, tujuan sosial, komunikasi publik, dan profesionalitas nazhir.

3.4. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Investasi Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi Daulah Fatimiyah juga ditopang oleh investasi pada pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Pendirian Masjid Al-

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12171
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Azhar yang berkembang menjadi pusat pendidikan dan berbagai disiplin ilmu, serta pembangunan perpustakaan dengan koleksi manuskrip ilmiah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas intelektual masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan konsep *Human Capital Theory* yang menekankan pentingnya investasi pendidikan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan ilmu pengetahuan merupakan wujud implementasi nilai-nilai syariah yang menjadikan pendidikan sebagai fondasi kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil telaah pustaka memperlihatkan bahwa pembangunan Universitas Al-Azhar pada masa Daulah Fatimiyah tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pengembangan pendidikan menghasilkan aparatur pemerintahan, ulama, ilmuwan, dan tenaga administrasi yang mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan serta perkembangan ekonomi.[8]

Dalam perspektif ekonomi pembangunan modern, investasi pada pendidikan merupakan salah satu faktor utama peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Fatimiyah dapat dipahami sebagai bentuk investasi modal manusia (*human capital investment*) yang relevan dengan konsep pembangunan ekonomi kontemporer.[9]

Posisi Al-Azhar sebagai pusat pendidikan memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi Fatimiyah mencakup pembentukan kapasitas pengetahuan yang mendukung administrasi, hukum, perdagangan, dan kehidupan sosial. Investasi pendidikan memiliki efek ekonomi tidak langsung karena meningkatkan kualitas keputusan, kemampuan inovasi, dan kesinambungan kelembagaan. Dalam konteks kontemporer, pelajaran ini relevan bagi pengembangan ekonomi Islam yang sering lebih menonjolkan inovasi produk keuangan daripada pembangunan kompetensi pengelola. Padahal, efektivitas zakat, wakaf, dan keuangan syariah sangat bergantung pada kemampuan analisis, literasi digital, tata kelola risiko, serta pemahaman maqashid al-syariah. Dengan demikian, anggaran pendidikan dan pelatihan bukan sekadar biaya operasional, melainkan investasi kelembagaan yang menentukan kualitas pelayanan ekonomi Islam.

Kajian integrasi keuangan sosial Islam mengonfirmasi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu strategi utama untuk memperkuat keberlanjutan lembaga [15]. Pengembangan kapasitas perlu mencakup kompetensi teknis, etika pelayanan, kemampuan mengelola teknologi, dan keterampilan mengukur dampak sosial. Pemaknaan ini sejalan dengan pengalaman Fatimiyah yang menghubungkan pusat ilmu dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Relevansinya bagi masa kini adalah perlunya kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga zakat, badan wakaf, regulator, dan pelaku usaha untuk menghasilkan riset terapan, standar kompetensi, serta inovasi kebijakan yang dapat diuji. Pendidikan kemudian berfungsi sebagai jembatan antara nilai normatif ekonomi Islam dan kapasitas implementasinya dalam lingkungan ekonomi yang berubah cepat.

3.5. Sintesis Temuan Penelitian

Daulah Fatimiyah merupakan salah satu pemerintahan Islam yang berhasil mengembangkan sistem ekonomi yang maju melalui integrasi kebijakan fiskal, perdagangan internasional, moneter, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan tersebut didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, pengelolaan Baitul Mal yang profesional, stabilitas politik, serta pemanfaatan posisi geografis Mesir sebagai pusat perdagangan dunia Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi pada masa Fatimiyah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan keseluruhan hasil telaah pustaka, dapat diidentifikasi bahwa keberhasilan ekonomi Daulah Fatimiyah merupakan hasil integrasi antara tata kelola fiskal, perdagangan internasional, pembangunan sektor riil, investasi sumber daya manusia, dan administrasi pemerintahan yang efektif. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Islam pada masa Fatimiyah tidak hanya bertumpu pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun institusi ekonomi yang mendukung pemerataan kesejahteraan dan stabilitas sosial.[8], [10]

Temuan ini menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya mengenai relevansi model ekonomi Daulah Fatimiyah terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam aspek tata kelola fiskal, penguatan sektor riil, pengelolaan keuangan sosial Islam, serta pembangunan ekonomi yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12171
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sintesis tersebut menunjukkan bahwa relevansi Daulah Fatimiyah bagi ekonomi Islam kontemporer bersifat prinsipil dan institusional, bukan reproduksi historis secara langsung. Prinsip keadilan distribusi, penguatan sektor riil, perlindungan pasar, dan investasi pengetahuan dapat diterapkan dalam bentuk kebijakan yang sesuai dengan negara modern. Kajian mengenai keselarasan Sustainable Development Goals dengan keuangan sosial Islam menunjukkan adanya titik temu pada pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan [22]. Tinjauan sistematis terbaru juga menegaskan bahwa zakat, wakaf, dan sedekah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi memerlukan koherensi kebijakan, pengukuran dampak, dan koordinasi antarlembaga [23]. Dengan demikian, sejarah Fatimiyah dapat berfungsi sebagai sumber konseptual untuk memperkuat arah kebijakan, sedangkan instrumen pelaksanaannya harus disusun berdasarkan kondisi sosial, hukum, dan ekonomi masa kini.

Dalam situasi krisis, integrasi fungsi sosial dan produktif menjadi semakin penting. Pengalaman kontemporer menunjukkan bahwa zakat, infak, dan wakaf dapat digunakan untuk mendukung layanan kesehatan, jaring pengaman rumah tangga, pembiayaan usaha mikro, serta pemulihan lembaga keuangan kecil [20]. Pola ini memiliki kesamaan fungsional dengan orientasi fiskal Fatimiyah yang menghubungkan penerimaan publik, pelayanan masyarakat, dan stabilitas sektor produksi. Namun, pelaksanaan modern perlu memastikan pemisahan mandat, kepatuhan syariah, akuntabilitas, dan evaluasi risiko agar dana sosial tidak digunakan secara tidak tepat. Integrasi bukan berarti mencampurkan seluruh sumber dana, melainkan menyusun koordinasi yang jelas antara anggaran negara, filantropi Islam, pembiayaan komersial syariah, dan partisipasi masyarakat.

Keberlanjutan juga mensyaratkan transformasi dari bantuan sesaat menuju pemberdayaan. Interpretasi wakaf tunai dari perspektif nazhir menekankan bahwa dampak ekonomi sangat bergantung pada kompetensi pengelola, pemilihan aset produktif, dan kemampuan menjaga pokok wakaf [26]. Hal ini sejalan dengan pelajaran dari sektor pertanian, perdagangan, dan pendidikan Fatimiyah yang berkembang karena dukungan institusi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Islam modern perlu membedakan program konsumtif untuk kebutuhan darurat dan program produktif untuk peningkatan pendapatan, lalu menetapkan indikator keberhasilan yang sesuai untuk masing-masing tujuan. Pendekatan tersebut membantu menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial segera dan pembentukan kemandirian ekonomi.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi pada masa Daulah Fatimiyah memperlihatkan bahwa kemajuan ekonomi lahir dari keterpaduan nilai, institusi, dan kebijakan. Nilai memberikan orientasi keadilan dan kemaslahatan; institusi menjamin kesinambungan administrasi; sedangkan kebijakan menghubungkan sumber daya dengan kebutuhan masyarakat. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menilai ekonomi Islam kontemporer secara lebih luas daripada sekadar kepatuhan kontrak keuangan. Ukuran keberhasilannya perlu mencakup kualitas distribusi, kekuatan sektor riil, akses layanan publik, kapasitas sumber daya manusia, dan kepercayaan masyarakat. Dengan kerangka ini, kontribusi historis Fatimiyah menjadi relevan sebagai bahan refleksi untuk membangun ekonomi Islam yang adaptif terhadap teknologi dan perubahan global, tetapi tetap berakar pada amanah, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Fatimiyah diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang mengintegrasikan pengelolaan fiskal, perdagangan internasional, pembangunan sektor riil, dan pengembangan sumber daya manusia dalam satu sistem yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Baitul Mal, optimalisasi instrumen fiskal seperti zakat, kharaj, dan jizyah, penguatan infrastruktur perdagangan, serta investasi pada pendidikan menjadi faktor utama yang mendukung stabilitas ekonomi dan kemajuan peradaban. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan keberlanjutan telah diterapkan secara nyata dalam tata kelola ekonomi Daulah Fatimiyah dan tetap relevan sebagai rujukan bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik, pembangunan sektor riil, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian komparatif antara kebijakan ekonomi Daulah Fatimiyah dengan dinasti Islam lainnya atau menganalisis implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik ekonomi syariah modern.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12171
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Referensi

[1] N. Fitrah dan H. Haeriyah, "STRATEGI PERDAGANGAN GLOBAL DAULAH FATIMIYAH," *JSE J. Sharia Econ.*, vol. 4, no. 3, hlm. 80–94, Jul 2025, doi: 10.46773/jse.v4i3.2085.

[2] J. Omercic, M. A. B. M. Haneef, dan M. O. Mohammed, "Economic Thought, Foundational Problems of Mainstream Economics and the Alternative of Islamic Economics," *Int. J. Islam. Econ. Finance IJIEF*, vol. 3, no. 2, hlm. 171–198, Jul 2020, doi: 10.18196/ijief.3226.

[3] M. Fardani, Nuratika, dan Sirajuddin, "Economic Strategies and Prosperity in the Fatimid Dynasty: Contributions to Islamic Economic Thought," *Apl. J. Res. Trends Soc. Sci. Humanit.*, vol. 3, no. 1, hlm. 12–23, Jun 2024, doi: 10.59110/aplikatif.v3i1.271.

[4] F. Ningsih dan Siradjuddin, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Fatimiyah : Studi Kebijakan Fiskal dan Perdagangan," *Al-Ubudiyah J. Pendidik. Dan Studi Islam*, vol. 5, no. 2, hlm. 232–240, Des 2024, doi: 10.55623/au.v5i2.372.

[5] M. Fardani, Nuratika, dan Sirajuddin, "Economic Strategies and Prosperity in the Fatimid Dynasty: Contributions to Islamic Economic Thought," *Apl. J. Res. Trends Soc. Sci. Humanit.*, vol. 3, no. 1, hlm. 12–23, Jun 2024, doi: 10.59110/aplikatif.v3i1.271.

[6] N. Annisa, N. B. Sapa, dan M. Lutfi, "Dinamika Ekonomi Dinasti Fatimiyah: Strategi Kebijakan, Peran Tokoh, Dan Faktor Kemajuan Serta Kemundurannya," *J. Asy-Syarikah J. Lemb. Keuang. Ekon. Dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, hlm. 117–137, Mar 2025, doi: 10.47435/asy-syarikah.v7i1.3302.

[7] M. T. Mahdi, "Islamic Economics: A Theoretical and Applied Vision in the Fatimid State: An Economic Historical Reading," *Wisdom J. Stud. Res.*, vol. 5, no. 01, hlm. 544–555, Mar 2025, doi: 10.55165/wjfsar.v5i01.578.

[8] A. Mutmainnah, E. Febrianti, S. Siradjuddin, dan N. B. Sapa, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH FATIMIYAH," *Ekon. Sharia J. Pemikir. Dan Pengemb. Ekon. Syariah*, vol. 10, no. 1, hlm. 161–184, Agu 2024, doi: 10.36908/esha.v10i1.1196.

[9] F. Ningsih dan Siradjuddin, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Fatimiyah : Studi Kebijakan Fiskal dan Perdagangan," *Al-Ubudiyah J. Pendidik. Dan Studi Islam*, vol. 5, no. 2, hlm. 232–240, Des 2024, doi: 10.55623/au.v5i2.372.

[10] "The Uniqueness of the Fāṭimid State." Diakses: 12 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/islam-2019-0027/html

[11] M. Fardani, Nuratika, dan Sirajuddin, "Economic Strategies and Prosperity in the Fatimid Dynasty: Contributions to Islamic Economic Thought," *Apl. J. Res. Trends Soc. Sci. Humanit.*, vol. 3, no. 1, hlm. 12–23, Jun 2024, doi: 10.59110/aplikatif.v3i1.271.

[12] A. A. Mukhlas, "The Principles of Public Finance in Islam: The Study of Zakat and Taxes," Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, vol. 6, no. 2, pp. 128–139, 2022, doi: 10.33379/jihbiz.v6i2.1646.

[13] A. Zahra Maulida and A. Purnomo, "Islamic Public Finance: Productive Zakat and Taxes As Instruments of The Country's Economy," Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy, vol. 1, no. 2, pp. 75–86, 2023, doi: 10.62265/jcaip.v1i2.45.

[14] A. Sahidin, "Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah," Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, vol. 14, no. 2, pp. 97–106, 2022, doi: 10.47411/al-awqaf.v14i2.148.

[15] T. Widiastuti, A. Robani, P. S. Sukmaningrum, I. Mawardi, S. Ningsih, S. Herianingrum, and M. U. Al-Mustofa, "Integrating Sustainable Islamic Social Finance: An Analytical Network Process Using the Benefit Opportunity Cost Risk Framework," PLOS ONE, vol. 17, no. 5, e0269039, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0269039.

[16] T. Widiastuti, A. Prasetyo, A. Robani, I. Mawardi, R. Rosida, and M. U. Al Mustofa, "Toward Developing a Sustainability Index for the Islamic Social Finance Program: An Empirical Investigation," PLOS ONE, vol. 17, no. 11, e0276876, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0276876.

[17] N. N. Fauziah and S. Kassim, "Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia," AL-MUZARA'AH, Special Issue, pp. 95–105, 2022, doi: 10.29244/jam.specialissue2022.95-105.

[18] A. K. Faiz and Arwin, "Reorienting Cash Waqf for Economic Development: A Maqāṣid Sharia Perspective Study on the Indonesian Waqf Board Case in Parepare," Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, pp. 35–50, 2023, doi: 10.24252/mh.vi.33618.

[19] R. Al Muhaimin, "Potensi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam, vol. 14, no. 1, 2021, doi: 10.32832/kasaba.v14i1.3666.

[20] Ascarya, "The Role of Islamic Social Finance During the Covid-19 Pandemic in Indonesia's Economic Recovery," International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, vol. 15, no. 2, pp. 386–405, 2022, doi: 10.1108/IMEFM-07-2020-0351.

[21] Q. Ayuniyyah, A. H. Pramanik, N. M. Saad, and M. I. Ariffin, "The Impact of Zakat in Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction from the Perspective of Gender in West Java, Indonesia," International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, vol. 15, no. 5, pp. 924–942, 2022, doi: 10.1108/IMEFM-08-2020-0403.

[22] E. Tok, A. Yesuf, and A. Mohamed, "Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence," Sustainability, vol. 14, no. 11, art. 6875, 2022, doi: 10.3390/su14116875.

[23] K. Dirie, M. M. Alam, and S. Maamor, "Islamic Social Finance for Achieving Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda," International Journal of Ethics and Systems, 2023, doi: 10.1108/IJOES-12-2022-0317.

[24] K. Nour Aldeen, I. S. Ratih, and R. Sari Pertiwi, "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia," ISRA International Journal of Islamic Finance, vol. 14, no. 1, pp. 20–37, 2022, doi: 10.1108/IJIF-10-2020-0223.

[25] D. Zulkarnaen, M. Mukhlisin, and S. E. Pramono, "Can Blockchain Technology Improve Accountability and Transparency of Cash Waqf in Indonesia?," Journal of Economic Impact, vol. 3, no. 3, pp. 158–166, 2021, doi: 10.52223/jei3032105.

[26] M. D. Muflihin, N. Faizah, A. I. S. Lating, R. A. Ariprativi, and F. F. Susanto, "An Interpretation of Cash Waqf for Islamic Economic Growth and Development from the Perspective of Waqf Nazhir," Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, vol. 6, no. 2, pp. 55–69, 2025, doi: 10.22515/finalmazawa.v6i2.11857.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12171
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)